

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemberian klaim atas sebuah wilayah yang dilakukan oleh negara sering kali berujung pada terciptanya konflik dengan negara lain. Pemberian klaim yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima mendapat tentangan dari Jepang yang merasa memiliki pulau itu dengan sah. Hal tersebut menarik untuk dikaji karena kedua negara memiliki dasar hukum yang kuat atas klaimnya masing-masing.

Wilayah Kepulauan Dokdo merupakan bagian dari Jepang. Jepang menganggap Kepulauan Dokdo sebagai bagian dari kedaulatannya berdasarkan pada persetujuan Perjanjian San Francisco. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak harus mengembalikan Pulau Dokdo kepada Korea, bahkan dalam pasal 2 perjanjian tersebut sama sekali tidak disinggung mengenai kewajiban Jepang untuk mengembalikan Pulau Dokdo hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebagian wilayah Rusia.

Awal dari kepemilikan Jepang atas pulau Dokdo berdasarkan pada aneksasi Jepang ke Semenanjung Korea yang mengakibatkan pihak Korea masuk dalam daftar negara jajahan Jepang. Dengan aneksasi tersebut Jepang mengambil alih hak wilayah maupun urusan diplomatik Korea.

Berdasarkan pada perjanjian itu Jepang merupakan pemilik yang sah, Jepang telah memasukan pulau tersebut kedalam sebuah distrik territorial atau

prefektur, yaitu prefektur shimane dan telah melakukan efektifitas di pulau tersebut.

Kepemilikan Jepang yang sah atas pulau Dokdo mendapat bantahan dari Korea Selatan. Pihak Korea Selatan juga merasa memiliki pulau tersebut. menurut Korea Selatan, pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Korea telah memiliki pulau tersebut sejak jaman tiga kerajaan pada tahun 512 masehi.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah perebutan/klaim suatu kepulauan oleh beberapa negara memang menjadi masalah yang rumit. Klaim suatu negara terhadap suatu wilayah negara lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan antara negara yang sama-sama memiliki klaim atas wilayah yang sama. Definisi kuno tentang negara, yakni kesatuan antara wilayah, penduduk, dan pemerintahan, tetap menjadi pedoman yang di anut<sup>1</sup>. Seperi yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan atas klaim kepulauan Dokdo atau Takeshima.

Dokdo adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan kepulauan Jepang (pada  $37^{\circ} 14' 26,8''$  N dan  $131^{\circ} 52' 10,4''$  E). Sebenarnya, Dokdo bukan satu pulau tapi merupakan gugusan pulau. Doko terdiri dari dua pulau utama, Dongdo (Pulau Timur) and Seodo (Pulau

---

<sup>1</sup> Surabaya Post Rabu 18/07/2008 *sengketa pulau dokdo* diakses tanggal 12 oktober 2008

Barat), yang sekitar 89 batu-batu yang lebih kecil tersebar. Kawasan Dongdo adalah 73297m<sup>2</sup>, dan Seodo memiliki luas 88639m<sup>2</sup>. Total luas kawasan Dokdo adalah 187.453 m<sup>2</sup>. Dokdo memiliki ekosistem yang unik. Memproduksi sejumlah kecil air tawar, para permukaan gunung berapi, sebagian ditutupi dengan tanah dan tipis lumut, menjadi habitat tentang 70-80 jenis tanaman, 22 jenis burung, dan 37 jenis serangga. Pulau sekitarnya, dimana dingin dan hangat memenuhi arus laut, juga merupakan tempat komunitas berbagai macam organisme laut, termasuk anjing laut dan sebanyak 100 jenis ikan.

Sebagai akibat adanya perang antara Jepang dan Rusia, wilayah Korea merupakan wilayah yang strategis bagi Jepang untuk basis pertahanannya. Jepang membutuhkan Korea selain sebagai basis pertahanan dari serangan Rusia juga merupakan sumber tenaga kerja yang pada saat itu sangat dibutuhkan Jepang untuk menyokong militer Jepang.

Bahkan sebelum perang berkobar antara Jepang dan Rusia, wilayah semenanjung Korea telah dianeksasi oleh Jepang. Jepang menganeksasi semenanjung Korea dikarenakan kebutuhan Jepang akan sumber daya Korea dan keinginan untuk membangun imperium Jepang yang lebih luas. Pada awalnya hubungan Jepang dan Korea berdasarkan pada hubungan dagang/ekonomi. Pemerintah Korea yang pada saat itu dipegang oleh kerajaan Choson membangun pemukiman untuk warga Jepang di tiga pelabuhan di Korea Selatan. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan perdagangan bisa lebih meningkat. Namun hal itu menjadi bumerang bagi Korea, memanfaatkan kondisi kacau di dalam negeri Korea karena perebutan kekuasaan, Jepang melakukan serangan. Korea salah

melakukan perhitungan akan serangan Jepang tersebut, Korea menganggap serangan Jepang tidak akan mempengaruhi wilayah Korea karena kondisi dalam negeri Jepang yang sedang kacau karena perebutan kekuasaan juga, sehingga Korea tidak mempersiapkan serangan Jepang tersebut. Hal yang didapat Jepang sudah dapat ditebak, Jepang mengakhiri pemerintahan 518 tahun Choson dan sejak saat itu Jepang menguasai Korea. Korea menandatangani perjanjian pendudukan dengan Jepang pada 22 Agustus 1910.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, secara otomatis Korea dalam kendali penuh Jepang.

Sebelumnya pada tahun 1904, Korea menandatangani perjanjian dengan Jepang. Pada perjanjian itu, Korea mutlak dalam kendali Jepang. Segala urusan diplomatik dan pemerintahan dibawah kekuasaan Jepang dan Korea menjamin untuk memberikan wilayahnya kepada Jepang jika dibutuhkan untuk kebutuhan perang Jepang.<sup>3</sup>

Jepang menggunakan wilayah Ullengdo dan Dokdo sebagai pusat komunikasi. Pusat komunikasi tersebut sangat dibutuhkan Jepang untuk mencegah serangan dari Rusia. Jepang membangun menara komunikasi di pulau Dokdo untuk memenuhi kebutuhan armada laut Jepang.

Wilayah Semenanjung Korea meliputi wilayah yang berada dalam teritorial Korea Utara maupun Selatan. Wilayah Korea Selatan memiliki pulau terluar yaitu Ullengdo dan Dokdo. Pulau Dokdo merupakan kumpulan batu

---

<sup>2</sup> Yang Seung Yoon & Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea Sejak awal abad hingga masa kontemporer*. Hal 137

<sup>3</sup> *Ibid* hal 138.

karang yang didalamnya termasuk dua karang besar yaitu Dongdo (timur) dan Seodo (barat) ditambah dengan beberapa karang kecil yang berjumlah kurang lebih 30 buah.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, secara otomatis wilayah yang dulu menjadi wilayah jajahan Jepang dikembalikan kepada negara/wilayah yang berkuasa sebelumnya. Hal ini tertuang dalam perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Francisco tanggal 8 September 1951, yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Dalam perjanjian San Francisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal.

Wilayah Dokdo merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh Korea Selatan atas kepemilikannya. Berdasarkan pada perjanjian San Francisco, Kepulauan Dokdo tidak termasuk kedalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang.<sup>4</sup> Pada pasal 2 perjanjian San Francisco hanya dibicarakan pengembalian wilayah pulau Formosa, Pescadores, Kuril dan Senkaku. Hal ini dapat diartikan sebagai legalitas Jepang untuk memiliki pulau itu.

Dengan asumsi bahwa Kepulauan Dokdo merupakan daerah tak bertuan (terra nullius), Jepang memasukkan wilayah Dokdo kedalam kedaulatannya melalui prefektur Shimane pada tanggal 22 februari 1905 dalam keputusan dewan prefektur Shimane No 40. Kebijakan Jepang ini diambil setelah adanya

---

<sup>4</sup> World Radio Komite nama-nama Geografis Amerika Serikat 2008-07-29 diakses tanggal januari 24 2009

sekelompok nelayan di prefektur Oki pada 17 Mei 1904 yang menginginkan legalitas pulau Dokdo dalam wilayah Jepang.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan karena nelayan tersebut mulai melakukan aktivitas perburuan singa laut di pulau Dokdo.

Dalih lain yang diberikan Jepang atas kepemilikan pulau Dokdo berupa bukti akan perjanjian pendudukan Jepang atas Korea. Pada saat penandatanganan perjanjian pendudukan Jepang atas Korea, secara otomatis wilayah Korea merupakan bagian dari wilayah jajahan Jepang. Namun, ada satu poin yang dianggap Jepang penting untuk mengklaim pulau Dokdo adalah bahwa Pulau Dokdo tidak termasuk dalam wilayah Korea dan dapat dianggap sebagai daerah tak bertuan (*Terra Nullius*).

Pada setiap tanggal 22 Februari dirayakan sebagai hari Takeshima, Takeshima merupakan sebutan Jepang untuk pulau Dokdo. Secara historis, Kepulauan Takeshima merupakan wilayah kedaulatan Jepang, hal ini dibuktikan dengan telah masuknya Takeshima dalam kedaulatan Jepang sejak masa Edo sekitar tahun 1603-1868. Pada tahun 1618 warga Jepang sudah memulai perburuan singa laut dan pemanfaatan kayu serta bambu di wilayah Ullengdo dan Dokdo, hal ini dapat dikategorikan sebagai efektifitas atas pulau Dokdo oleh Jepang. Sehingga menurut hukum internasional Jepang merupakan pemilik yang sah pulau Dokdo. Bahkan pada tahun 1661, pemerintah Jepang telah memberikan ijin warganya untuk melakukan perjalanan ke Takeshima.

---

<sup>5</sup> <http://Wiki.com/liancourtrocks/dok/190708.htm>. diakses tanggal 27 Januari 2009

Pada tahun 2008, Jepang kembali mempertegas klaimnya dengan cara memasukkan kepulauan Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang, hal ini bertujuan untuk pengenalan kepada anak-anak sekolah menengah. Selain tujuan untuk pengenalan kepada anak sekolah menengah, pemasukan wilayah Takeshima kedalam buku pelajaran sekolah menengah Jepang memiliki makna bahwa Jepang merupakan pemilik legalitas atas pulau Takeshima, bukan Korea Selatan atau negara manapun.

Dalam kepemilikan Kepulauan Takeshima, Jepang mendapat saingan atas kedaulatan di pulau Takeshima atau Dokdo. Klaim atas kepemilikan pulau Takeshima atau Dokdo juga ditunjukkan oleh Korea Selatan. Korea Selatan menganggap pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya.

### **B. Pokok Permasalahan:**

Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

Mengapa Korea Selatan mengklaim pulau Dokdo/Takeshima?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam menyusun tulisan ini penulis memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Memperoleh gambaran tentang bagaimana upaya Korea Selatan dalam membangun persepsi atas kepemilikan Kepulauan Dokdo di tengah sengketa dengan Jepang

2. Mendapat gambaran tentang kepentingan yang melatarbelakangi Korea Selatan untuk memberikan klaim terhadap Kepulauan Dokdo
3. Berusaha mengimplementasikan ilmu dan teori-teori yang diperoleh penulis selama studi, yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam bentuk tulisan
4. Guna memenuhi kewajiban akademis sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis sengketa Teritorial Jepang – Korea Selatan atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima adalah teori persepsi dan konsep kepentingan nasional.

##### **1. Teori persepsi**

Dalam pengertian bebas persepsi diartikan sebagai cara pandang seseorang memandang orang lain yang didasarkan oleh pengetahuan dan informasi serta fakta – fakta yang dimiliki seseorang. Persepsi diberikan pada tempat yang penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan persepsi memandu untuk bertindak tanpa menghiraukan apakah persepsi itu benar atau salah, tindakan – tindakan yang kita ambil berdasarkan pada persepsi kita.



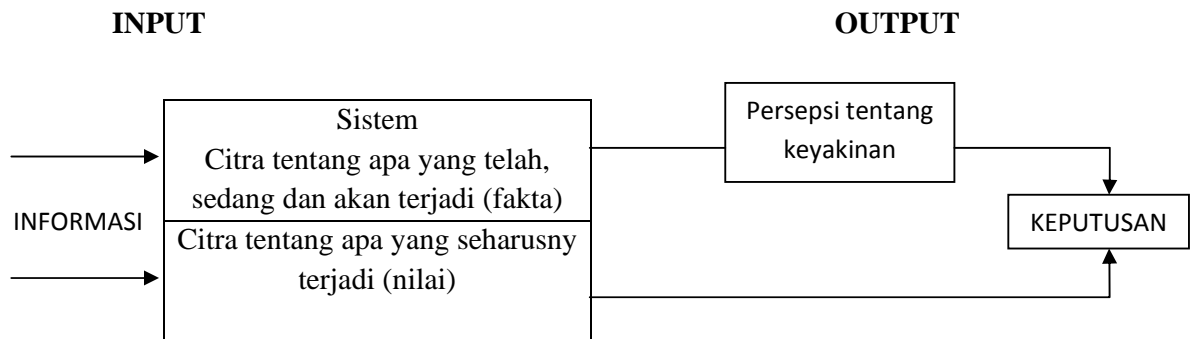
Terdapat tiga komponen dalam persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan<sup>6</sup>. Nilai, merupakan preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibandingkan realitas lainnya. Keyakinan, adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar terbukti. Dan pengetahuan, adalah bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Bagi para teoritis perseptual, bahwa pengetahuan mengandung komponen subjektif atau objektif. Fakta tidak berbicara sendiri tapi diberi arti oleh setiap penafsir sesuai dengan titik pandang analitisnya sendiri. Kesimpulan mengenai fakta tergantung pada penafsiran terhadap fakta tersebut. Lebih jauh lagi, fakta tidak muncul dari realitas melainkan dari keping informasi tertentu atas realitas yang diseleksi oleh seorang pengamat sesuai dengan kepentingannya sedang keping informasi lainnya ditolak karena tidak sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda. Bruce Russet dan Harvey Starr menjelaskan bagaimana citra seseorang mempengaruhi persepsinya tentang dunia disekitarnya, melalui proses sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Walter S. Jones, *Logika HI : Persepsi Nasional I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 276.

**Bagan 1.1**



Sumber: Ole R. Holsti, *The Belief System and national Images: A Case Study*, dikutip dalam B.Russet dan H Starr, *World Politics* (New York: Freeman 1985).hal.305

Pada awalnya keyakinan (fakta) dan nilai seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan stimulasinya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasarkan atas sikap dan citra yang diyakini selama ini, stimulasi itu diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunianya dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk.

Persepsi dan citra yang terbentuk oleh para pengambil keputusan juga dipengaruhi oleh faktor – faktor, seperti : ideologi, kepribadian, tingkat dan lingkungan pendidikan, status sosial, kegiatan dan pengalaman masa lampau,

kerugian dan keuntungan potensial serta keadaan emosional seseorang<sup>7</sup>. Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Tanggapan seseorang pada situasi tergantung kepada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan cara orang dalam memandang kenyataan tersebut.

Persepsi seseorang tokoh negara akan ikut mempengaruhi pembuatan keputusan negara tersebut. Hasil/persepsi dari pembuatan keputusan suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang tokoh – tokoh negara dalam mendefinisikan suatu situasi tertentu. Cara pandang / persepsi seseorang dalam mendefinisikan situasi tertentu itu tergantung dari citra dan sistem keyakinan yang dianutnya.

Dalam masalah perebutan klaim kepulauan Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan terdapat tiga komponen yang diwajibkan untuk membentuk sebuah persepsi. Yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan. Korea Selatan menggunakan tiga komponen tersebut untuk menjelaskan klaimnya atas kepulauan Dokdo.

Dalam hal ini terdapat input yang berfungsi sebagai informasi, informasi yang didapat oleh Korea Selatan adalah bahwa kepulauan Dokdo merupakan bagian dari kedaulatan wilayahnya, informasi tersebut membentuk sebuah persepsi dan keyakinan bahwa kepulauan tersebut merupakan bagian dari wilayah Korsel sehingga menghasilkan sebuah output berupa keputusan yang harus diambil

---

<sup>7</sup> Jack C. Plano dan Robert E. Riggs, *Kamus Analisa Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 148-149.

yaitu keputusan pemerintah Korea Selatan untuk memberikan klaim atas kepulauan Dokdo.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton:

“Tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi: negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”<sup>8</sup>

Tulisan ini memakai konsep kepentingan nasional untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan ataupun menganjurkan perilaku internasional suatu negara. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kepentingan-kepentingan yang harus diwujudkan, baik secara kerjasama maupun paksaan.

Kepentingan nasional adalah perpaduan antara kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan kepentingan nasional bukan cita-cita yang bisa dipakai secara abstrak maupun ilmiah tetapi merupakan produk persaingan politik internal yang konstan. Menurut Jack Plano dan Roy Olton kepentingan suatu negara merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai suatu masyarakat yang makmur. Negara dikatakan dapat menjaga kepentingan negaranya apabila negara tersebut mampu mempertahankan Identitas Politiknya bahwa sejauh mana bangsa mampu mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya dapat ditinjau pada :

---

<sup>8</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *kamus hubungan internasional (terjemahan)* Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 6-7.

### **a. Kemerdekaan**

Kemerdekaan bagi sebuah negara memiliki arti yang begitu penting. Kemerdekaan merupakan sebuah pengakuan atas eksistensi kedaulatan sebuah negara. Merdeka berarti lepas dari pengaruh bangsa lain dan juga bebas menentukan arah dari perjalanan suatu bangsa.

Kemerdekaan Korea Selatan atas penjajahan Jepang dirasa memiliki kejanggalan, karena terdapat wilayah yang seharusnya menjadi wilayah kedaulatan Korea Selatan ternyata belum mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Wilayah tersebut adalah Dokdo.

Klaim yang diberikan Jepang atas kedaulatan Kepulauan Dokdo membuat Korea Selatan merasa terusik akan kemerdekaannya. Jika ditilik dari faktor dan fakta sejarah, Kepulauan Dokdo merupakan bagian dari Korea Selatan, namun Jepang memberikan klaim karena mendapatkan Dokdo secara okupasi, Dokdo dianggap sebagai daerah tak bertuan pada saat itu.

Jika Jepang berniat untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Korea Selatan, sudah seharusnya Dokdo juga masuk dalam wilayah kedaulatan Korea Selatan yang secara otomatis Jepang harus mengakui bahwa Kepulauan Dokdo itu bukan bagian dari wilayahnya dan merupakan bagian dari kedaulatan Korea Selatan.

Kepentingan Korea Selatan untuk menjaga kedaulatan Kepulauan Dokdo merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan legalitas sejarah. “Kepulauan Dokdo berdasarkan sejarah, geografi, maupun hukum internasional, bagian

wilayah kekuasaan Korea, dan mengatakan, Jepang seharusnya tidak menderita kerugian besar karena ingin mendapatkan sesuatu yang kecil." Kata Ban Ki Moon.<sup>9</sup>

Upaya Korea Selatan untuk melindungi kemerdekaan akan wilayahnya, dalam hal ini mempertahankan Kepulauan Dokdo, menimbulkan konflik dengan Jepang. Korea Selatan menganggap konflik territory dengan Jepang merupakan hal yang terpenting, Korea Selatan tidak akan tinggal diam untuk merelakan Jepang mencaplok kepulauan Dokdo dari kedaulatan wilayah Korea Selatan. Bahkan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya atas Kepulauan Dokdo, Korea Selatan siap memutus hubungan bilateral dengan Jepang. "Sengketa Dokdo merupakan masalah yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan kami. Dengan demikian, isu ini dapat dianggap lebih penting dibanding hubungan Korsel-Jepang dan masalah-masalah lainnya,"<sup>10</sup> kata Menlu Ban Ki-moon dalam acara konferensi pers.

#### **b. Kepentingan Ekonomi.**

Setiap negara berusaha meningkatkan dan mencapai kesejahteraan rakyatnya. Maka makna kepentingan ekonomi merupakan faktor penting dalam tujuannya tersebut. Seperti Korea Selatan sendiri pun, posisi geo politik dan geo ekonomi merupakan sumber atau *raw materials*. Jika salah satu negara tidak

---

<sup>9</sup> <http://www.kompas.com> *Korsel Tak Akan Pernah Mundur Untuk Memprotes Jepang Soal Dokdo* Kamis, 17 Maret 2005. Diakses tanggal 13-12-2008

<sup>10</sup> *Kompas Demi Gugusan Pulau Dokdo, Korsel Siap putus hubungan dengan Jepang* Kamis, 10 Maret 2005. Diakses tanggal 13-12-2008

mempunyai, maka negara itu akan mengalami kesulitan untuk membangun negaranya. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang minim akan sumber daya alam, walaupun wilayah Korseul tergolong cukup luas namun negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan. Kebutuhan industri Korea Selatan tergantung pada pasokan sumber daya alam dari negara lain. Perkembangan industri Korea Selatan yang dimulai pasca krisis menimpa negara tersebut tahun 1997 dinilai sangat pesat. Korea Selatan membuka lebar-lebar pasar domestiknya dan melaksanakan kebijakan ekspor besar-besaran. Sehingga laju perekonomian Korea Selatan tergantung pada sector industri.

Mengingat tingginya pertumbuhan industri di Korea Selatan maka kebutuhan akan sumber daya alam itu sendiri meningkat. Sumber daya alam yang dibutuhkan Korea Selatan berupa mineral seperti minyak dan gas. Korea Selatan merupakan negara kedua konsumen gas terbesar di dunia, setelah China. Ketergantungan Korea Selatan akan impor gas akan sedikit berkurang jika Kepulauan Dokdo berhasil dipertahankan Korea Selatan. Kepulauan Dokdo disinyalir mengandung sumber gas hidrat. Potensi gas yang ada di kepulauan Dokdo diketahui sama dengan jumlah impor gas Korea Selatan selama 30 tahun.

Selain potensi gas, Kepulauan Dokdo juga menyimpan kekayaan alam berupa hasil laut yang melimpah. Kekayaan biota laut dapat dimanfaatkan Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Korea Selatan yang begitu tinggi. Disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, hasil laut dapat juga dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena masyarakat khususnya nelayan dapat memanfaatkannya menjadi mata pencaharian. Potensi pariwisata

juga dapat menjadi andalan Kepulauan Dokdo untuk membangun perekonomian Korea Selatan.

### **E. Hipotesa**

Korea Selatan mengklaim Kepulauan Dokdo karena:

1. Korea Selatan berusaha untuk mempertahankan legalitas atas kepemilikan kepulauan Dokdo berdasarkan pada fakta sejarah, geografis dan hukum internasional
2. Kepentingan ekonomi Korea Selatan berupa kebutuhan akan sumber daya alam dan potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Dokdo.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, perlu adanya pembatasan dan penentuan ruang lingkup kajian. Penulis membatasi penelitian pada kepentingan Korea Selatan atas sengketa pulau Dokdo dengan Jepang pada masa sengketa 4 tahun terakhir yaitu 2005 sampai 2008. Namun masa sebelum tahun tersebut tetap menjadi perhatian penulis selagi masih berkaitan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah :



BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan mengenai bagaimana sengketa kepulauan Dokdo/Takeshima bisa terjadi dan mempengaruhi hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Kerangka pemikiran, menjadi landasan teori penulisan skripsi ini yang menggunakan teori persepsi dan konsep kepentingan nasional yang dirasa cukup untuk mencakup dan menjelaskan kepentingan Jepang. Hipotesis berisi dugaan awal mengenai kepentingan Korea Selatan atas sengketa kepulauan Dokdo berupa kepentingan politik dan ekonomi. Jangkauan Penelitian, yang membatasi wilayah kaji penelitian ini pada kepentingan Korea Selatan pada sengketa pada tahun 2005 sampai 2008. Dan berisi mengenai jenis penilitan ini serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas gambaran umum Korea Selatan, geografis, kekuatan nasional dan politik luar negeri Korsel pasca perang dingin.

BAB III : Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana kontroversi persepsi antara Korea Selatan dan Jepang atas Kepulauan Dokdo

BAB IV : Berisi tentang kepentingan Korea Selatan dalam sengketa kepulauan Dokdo dengan Jepang.

BAB V : Merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan.